

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Daerah di Kota Makassar. *Ekonomika*, 5(April), 17–37. <http://eprints.upnyk.ac.id/11978/>
- blitarkota.go.id. (2022). *Walikota Blitar Targetkan Realisasi APBD Pada Semester I*. <https://Blitarkota.Go.Id>.
- covid19.blitarkota.go.id. (2020). *Dampak Wabah Corona, Pendapatan Asli Daerah Kota Blitar Turun 66 Milliar Rupiah*. Covid19.Blitarkota.Go.Id.
- Dahliah, D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Jumlah Penduduk Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah. *Jesya*, 5(2), 2750–2761. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.896>
- Defitri, S. Y. (2020). Pengaruh Belanja Modal Dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Fokus Bisnis : Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 19(2), 107–119. <https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v19i2.476>
- Erawati, N. T., & Suzan, L. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bandung. *E-Proceeding of Management*, 2.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariete SPSS 25* (9th ed.). Universitas Diponegoro.
- Hadi, S. (2021). *APBD Kota Blitar 2022 Defisit Rp 144 Miliar*. <https://Surabaya.Tribunnews.Com>.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah* (3rd ed.). Salemba Empat.
- Halim, A. (2012a). *Akuntansi Keuangan Daerah* (Keempat). Salemba Empat.
- Halim, A. (2012b). *Pengelolaan Keuangan Daerah* (Ketiga). UPPSTIM YKPN.
- Kementerian Dalam Negeri. (2011). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011*.
- Kuncoro, M. (2014). *Otonomi Daerah* (Ketiga). Erlangga.
- Mahardika, E. P. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11, 407–416.

- Malau, E. I., & Parapat, E. P. S. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal EK&BI*, 3, 332–337.
- Melinda, S., & Adilistiono. (2020). Perhitungan Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kabupaten Banjarnegara. *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan*, 3(1), 117–128.
- Nindita, N. L. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. *JAF- Journal of Accounting and Finance*, 2(1), 12. <https://doi.org/10.25124/jaf.v2i1.2098>
- Nurkholis, M. K. (2019). *Penganggaran Sektor Publik*. Tim UB Press.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemeirntah Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019*.
- Puspitasari, A., & Salisa, N. R. (2017). Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten Se-Keresidenan Pati Tahun 2010-2016). *Accounting Global Journal*, 1(1), 30–41.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualiatif, Dan R&D*.
- Suwardjono. (2017). *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan* (Ketiga). BPFE-YOGYAKARTA.